



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Sabet WTP LAGI!



BENGKULU - Untuk kelima kalinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Kendati demikian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tetap mengingatkan agar dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan penganggaran. Serta mendorong dan memotivasi Pemprov untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

"Kita memberikan opini WTP atas LKPD Pemprov Bengkulu TA 2021," kata Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Dr. Beni Ruslandi, SE, M.Com, AK. CA, CSFA, CFPa, dalam sidang paripurna pengumuman DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Kamis (19/5).

Dijelaskannya, usai dilakukan pemeriksaan dan pemberian opini WTP pihaknya tetap mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman terkait makna Opini WTP. Pasalnya, masih ada temuan permasalahan terkait Sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pertama pengelolaan kas belum memadai. Permasalahan ini karena masih terdapat Bendahara Pengeluaran yang menyimpan uang tunai pada brankas dengan nominal melebihi ketentuan dan terdapat 236 rekening pada Bank Bengkulu yang tidak memiliki dasar hukum," imbuhnya.

Kemudian untuk poin Kedua, lanjutnya, pengelolaan persediaan belum memadai, seperti pada

penatausahaan atas persediaan rusak atau kadaluarsa. Ketiga, pelaksanaan belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan, yakni realisasi belanja perjalanan dinas, pengelolaan dana BOS, dan kurang volume pekerjaan. Lalu keempat pelaksanaan belanja modal pada beberapa kontrak tidak sesuai ketentuan.

"Sedangkan pada LHP Kinerja yakni upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin belum sepenuhnya memadai," ungkapnya.

Terkait atas temuan ini, ia menekankan bahwa catatan tersebut wajib ditindaklanjuti Gubernur dan jajarannya sesuai rekomendasi atas LHP selambatlambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

"Untuk Pemprov kita minta agar memprioritaskan dalam menindaklanjuti temuan itu. Karena tindakanjuti rekomendasi yang dilakukan masih rendah," pesan Beni.

Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah meminta OPD agar menggeber dalam tempo 60 hari untuk menindaklanjuti catatan ataupun rekomendasi BPK RI atas LKPD dan laporan kinerja. "Saya minta kepada Pak Sekda agar segera tindak lanjuti. Terutama

dalam manajemen kas, pengeluaran dana bos. Temuan temuan ini, agar tidak menjadi temuan baru, management aset harus terpadu agar," tegas Rohidin.

Apalagi, ia menilai tindak lanjut atas rekomendasi BPK ini, dinilai penting bagi berjalannya pemerintah daerah. "Juni paling lambat diterima, jika terlambat makan usulan OPD terkait, ya ditolak. Dengan tindakanjuti itu kita targetkan kedepan bisa semakin baik," demikian Rohidin.

Disisi lain, Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri optimistis jika dari catatan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dapat diselesaikan sebelum tempo 60 hari tersebut.

"Dalam waktu dekat ini, kita akan rapat dengan OPD OPD untuk tindaklanjuti hal ini," kata Hamka.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri juga berpesan agar pemda tidak cepat merasa puas atau opini WTP yang diberikan BPK RI.

"Kitapun meminta agar temuan dapat ditindaklanjuti, sebagaimana arahan atau rekomendasi dari BPK RI. Disamping itu kita tetap berharap opini ini kedepannya kembali dapat dipertahankan," pesannya. (war)